

Implementasi Kebijakan Program Inovasi Daerah di Kota Sukabumi (Studi Kasus Inovasi Lapas Sehat dan Bugar “LASEGAR”)

Agus Rusmana¹, Anisa Kamila², Qinanti Maulid NP³, Qori Febriyanti⁴,
Resy Restia Mulyani⁵, Salma Sachry Nurazizah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

e-mail: agusrusmana150800@gmail.com¹, anisakamila950@gmail.com²,
qinantimaulid24@ummi.ac.id³, qorifebriyanti01@gmail.com⁴,
resyrestia73@gmail.com⁵, salmasachrynuraz@gmail.com⁶

Abstrak

Implementasi kebijakan inovasi dalam pelayanan publik masih bersifat baru. Lapas Kelas IIB kota Sukabumi adalah Lembaga pemasyarakatan yang melakukan inovasi Lasegar (Lapas sehat dan Bugar) dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan kepercayaan kepada warga binaan sebagai hak untuk mendapatkan akses pelayanan tanpa adanya diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif dengan subyek purposive sampling dengan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data berdasarkan teori dari M.S Grindle dalam konteks implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa inovasi program Lasegar berdampak baik terhadap masalah yang di hadapi warga binaan untuk menghapus sistem diskriminasi dan memudahkan akses pelayanan kesehatan karena penyebaran penyakit terdeteksi lebih dini serta menurunnya jumlah warga binaan yang dirujuk ke rumah sakit. Faktor penghambat dari program Lasegar adalah jumlah tenaga kesehatan yang kurang karena jumlah warga binaan dari tahun 2020-2022 terus bertambah serta kurangnya sarana lapas hingga terjadinya over kapasitas.

Keywords: *Implementasi Kebijakan, Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah kota Sukabumi.*

Abstract

The implementation of innovation policies in public services is still new. Class IIB Prison in the city of Sukabumi is a penitentiary that innovates Lasegar (Healthy and Fit Prison) with the aim providing safe, comfortable and trustworthy health service to inmates as the right to get access to services without discrimination. The research method used is descriptive qualitative with purposive sampling as the subject with more data collection techniques on observation, interviews and documentation. Then, data analysis was carried out based on the theory of M.S Grindle in the Lasegar program has had a positive impact on the problems faced by the assisted residents in order to eliminate the system of discrimination and facilitate access to health service because the spread of diseases is detected earlier and the number of inmates referred to hospitals has decreased. The inhibiting factors for the Lasegar program are the insufficient number of health workers because the number of inmates from 2020-2022 continues to grow and the lack of prison facilities leads to overcapacity.

Keywords: *Policy implementation, Regional Innovation, Local Government of the city of Sukabumi*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pokok dari pelayanan publik dibagikan secara desentralisasi tidak sentralistik. Oleh karena itu, Pemerintah harus terus berinovasi dalam pelayanan publik untuk upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mengatasi permasalahan yang ada di suatu daerah.

Lapas Kelas IIB Kota Sukabumi adalah Lembaga pemasyarakatan yang terletak di Kota Sukabumi Jl. Lettu Bakri No. 17 Kota Sukabumi dengan total 1000 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terisolasi dari akses pelayanan kesehatan, dan terjadinya diskriminasi terhadap warga binaan yang tidak berdomisili di Kota Sukabumi serta penyebaran penyakit relatif tinggi. Sedangkan dalam Undang-undang No 12 tahun 1995 pasal 14 tentang pemasyarakatan mengatakan bahwa “yang meliputi hak-hak narapidana untuk mendapatkan perawatan, layanan kesehatan dan makanan yang layak”.

Dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 3 tahun 2021 tentang inovasi daerah mengatakan bahwa “dalam rencana mengembangkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah di Daerah Kota Sukabumi, diperlukan inovasi daerah berupa pembaharuan yang terbentuk dari hasil penerapan ilmu pengetahuan dan temuan baru di bidang teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sehingga dikembangkanlah satu inovasi yang diberi nama Lasegar (lapas sehat dan bugar) dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Wali Kota No 188.45/190-Bappeda/2022 tentang inovasi daerah yang terdaftar di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Tabel 1. Daftar data warga binaan yang terkena penyakit di lapas

| No | Kasus | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 | TB (Tuberculosis) | 3 orang | 9 orang | 35 orang |
| 2 | HIV (Human Immunodeficiency Virus) | 6 orang | 4 orang | 3 orang |
| 3 | Scabies | 58 orang | 114 orang | 93 orang |
| 4 | Hipertensi | 12 orang | 11 orang | 17 orang |
| 5 | DM (Diabetes Melitus) | 2 orang | 4 orang | 5 orang |

Sumber: klinik Lapas Kota Sukabumi

Berdasarkan tabel diatas pada penyakit TB (Tuberculosis) mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari tahun 2020 tercatat ada 3 orang yang teridentifikasi, tahun 2021 ada 9 orang dan di tahun 2022 ada sebanyak 35 orang warga binaan, lalu penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) tercatat tahun 2020 ada 6 warga binaan, di tahun 2021 mengalami penurunan dengan ada 4 warga binaan dan tahun 2022 ada 3 orang warga binaan. Penyakit Skabies tahun 2020 ada 58 orang, di tahun 2021 dan 2022 adanya penyakit scabies dan mengalami penurunan sebanyak 11% dari 114 warga binaan menjadi 93 warga binaan. Untuk penyakit tidak menular seperti Hipertensi di tahun 2020 ada 12 orang dan tahun berikutnya mengalami kenaikan angka penemuan hipertensi dengan skrining PTM dari 11 warga binaan menjadi 17 warga binaan. DM (diabetes Melitus) tahun 2020 ada 2 orang dan juga mengalami kenaikan angka penemuan hipertensi dengan skrining PTM pada tahun 2021 dan 2022 yaitu di angka 4 orang menjadi 5 orang warga binaan.

Maka dari itu inovasi Lasegar ini diciptakan untuk warga binaan yang ada di Lapas kelas IIB Kota Sukabumi dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan kepercayaan kepada warga binaan sebagai hak untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program inovasi Lasegar di Lapas Kelas IIB Kota Sukabumi.

Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam (pramono, 2022) yaitu: “diartikan sebagai aktivitas Tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan serangkaian konsep yang memuat perencanaan dengan matang kemudian di implementasikan berupa kebijakan publik dengan harapan tercapainya tujuan yang telah di rencanakan.

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi M.S Grindle (1980) dalam (Tachjan, 2006) menurut Grindel dalam proses implementasi kebijakan terdapat 2 pendekatan. *Pertama* di lihat dari isi kebijknnya *kedua* dilihat dari konteks kebijakannya. Semua Negara apabila ingin mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dipastikan tidak akan terlepas dari kedua pendekatan tersebut baik negara maju ataupun negara berkembang.

Pendekatan pertama dilihat dari Isi kebijakan yaitu:

1. Kepentingan yang mempengaruhi
2. Bentuk manfaat
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Pengambilan keputusan
5. Sumber daya yang terlibat

Pendekatan kedua dilihat daari Konteks kebijakan yaitu:

1. Kuasa, penting, dan strategi aktor
2. Karakteristik lembaga penguasa
3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut (Madani & Rusdi, 2011) adalah: “Kebijakan publik adalah Suatu tanda yang rumit. Fenomena ini berlangsung dengan jumlah ketetapan yang dilakukan oleh kelompok orang atau sejumlah individu, yang selanjutnya dilakukan oleh sebuah organisasi atau pemerintahan yang tujuannya menyelesaikan kepentingan dan masalah publik”.

Berdasarkan dari definisi diatas maka peneliti mendefinisikan kebijakan publik ialah suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan tujuan menyelesaikan suatu kepentingan dan masalah publik yang terjadi.

Inovasi Daerah

Inovasi adalah suatu pemikiran baru yang membutuhkan proses dalam pengaplikasiannya. Artinya bahwa tidak semua inovasi dapat secara langsung diterima/diadopsi oleh khalayak umum. Inovasi perlu dikomunikasikan terlebih dahulu, kemudian adanya proses keputusan inovasi, yakni proses seseorang atau individu menerima ataupun menolak suatu inovasi.

Menurut Rogers dalam (Sa'ud & Ridwan, 2018) bahwa proses pengambilan keputusan inovasi adalah proses mental dimana seseorang/individu terlebih dahulu mengetahui suatu inovasi, sampai memutuskan untuk menerima atau pun menolak, melakukan implementasi lalu tahap konfirmasi kepada keputusan inovasi.

Lasegar

Lasegar atau Lapas Sehat dan Bugar merupakan salah satu inovasi daerah yang ada di kota Sukabumi. Lasegar sendiri berfokus kepada 590 warga binaan yang ada di Lapas kelas IIB kota Sukabumi dalam melayani kesehatan para warga binaan. Program inovasi daerah ini berkolaborasi antara Bappeda Kota Sukabumi, Puskesmas Pabuaran dan Lapas kelas IIB kota Sukabumi

Latar belakang program inovasi ini yaitu pada tahun 2020 ditemukannya penyakit HIV terhadap salah satu warga binaan, penyakit TB terhadap dua warga binaan dan lima orang warga binaan yang teridentifikasi penyakit DBD. Dengan adanya masalah tersebut perlu intervensi yang melibatkan fasilitas Puskesmas Pabuaran sehingga terlahirlah satu inovasi baru yang diberi nama Lapas Sehat dan Bugar (Lasegar) dari Pemerintah Kota Sukabumi berdasarkan No Kebijakan tentang Inovasi Daerah W11. P4S. HH. 02. 02. 02. 081 dan di nomor 44/041/PKMPBR. Dalam mendukung pencapaian misi pertama Wali Kota Sukabumi dengan lahirnya generasi baru yang berpendidikan, berbudaya, pintar, inovatif dan memiliki solidaritas yang tinggi.

METODE

Metode yang digunakan adalah Kualitatif deskriptif. Subjek yang digunakan peneliti menggunakan Purposive Sampling, menurut (Moleong, 2006) dengan maksud memilih sampel dengan mempertimbangkan (1) subjek yang dipilih oleh peneliti terlibat langsung dalam proses inovasi Lasegar (2) pihak yang menguasai masalah, memberi data dan bersedia untuk dimintai Informasi. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu di Lapas Kelas IIB Kota Sukabumi

Berikut yang menjadi informan dalam penelitian “Implementasi Kebijakan Program Inovasi Daerah di Kota Sukabumi (Studi Kasus inovasi Lapas Sehat dan Bugar “LASEGAR”). Informan pertama Kepala Lapas Kota Sukabumi sebagai perencana program Inovasi Lasegar, Informan ke dua Kabid Litbang BAPPEDA Kota Sukabumi sebagai Fasilitator Program Inovasi Lasegar, Informan ketiga Kasubag Inovasi dan Pengembangan BAPPEDA Kota Sukabumi sebagai Fasilitator Program Inovasi Lasegar, dan Informan ke empat Kepala Puskesmas Pabuaran sebagai pelaksana dalam Program Inovasi Lasegar.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2009) mengemukakan bahwa “untuk penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilaksanakannya pada kondisi yang alamiah atau sosial, sumber datanya primer serta teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang dikemukakan oleh M.S. Grindle bahwa terdapat dua pertanyaan yang berfokus pada teori ini diantaranya ada isi kebijakan dan konteks kebijakan. Peneliti sendiri menggunakan salah satu dari pendekatan yang ada yaitu konteks kebijakan. Isi dari konteks kebijakan sendiri diantaranya yaitu: (1) ada kuasa, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga, rezim yang sedang berkuasa di lingkungan dimana implementasi kebijakan dilaksanakan, (3) mengukur tingkat kepatuhan serta respon dari aktor atau pelaksana dalam menyikapi implementasi kebijakan.

Kuasa, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Suatu inovasi tidak akan berjalan dengan baik jika dilakukan tanpa melibatkan pihak atau instansi lain, Begitupun dengan pelaksanaan program inovasi Lasegar, dalam hal ini Wali Kota Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus penanggung jawab dan menjalin hubungan dengan beberapa pihak diantaranya Bappeda kota, Lapas kota dan Puskesmas Pabuaran kota Sukabumi yang menginisiasi dan membantu merealisasikan program inovasi Lasegar.

Pertama hasil observasi menunjukkan bahwa warga binaan memiliki kesulitan berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang dapat menimbulkan diskriminasi. Kemudian mereka juga membutuhkan pelayanan kesehatan yang kompetitif karena keterbatasan fasilitas yang ada di lapas. Tidak terdeteksinya masalah kesehatan sejak awal membuat tenaga kesehatan Puskesmas Pabuaran mengalami kesulitan untuk mengetahui status kondisi kesehatan warga binaan. Kamar yang berukuran 3x4 meter di isi oleh 30-40 orang, itu bisa menjadi masalah kesehatan yang kompleks. Dengan begitu Puskesmas dan Lapas untuk pertama kalinya dengan resmi bekerjasama pada tahun 2018. pada awal

bekerjasama Puskesmas Pabuaran yang awalnya hanya memiliki 8 pelayanan di tahun 2022 sudah menjadi 22 pelayanan, contohnya seperti konseling kejiwaan.

Kedua strategi aktor yang terlibat, untuk mensukseskan salah satu misi dari Wali Kota Sukabumi yaitu dengan cara memulai dari penerapan dasar hukum program inovasi lasegar sesuai MOU W11.P4S.P4S22.HH.02.02.02.081 dan di Nomor 440/041/PKMPBR terjalannya kontrak kerjasama antara Walikota Sukabumi dengan Lapas Kota Sukabumi dan Puskesmas Pabuaran yang setiap tahunnya akan terus diperbaharui sehingga implementasi kebijakan akan terus berkelanjutan.

Ketiga, aktor utama yang terlibat dalam kebijakan program inovasi lasegar yaitu Lapas Kelas IIB Kota Sukabumi, Bappeda Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Puskesmas Pabuaran, dan aktor pendukung lain yang bekerja sama dalam inovasi lasegar yaitu Klinik Bahagia dimana pada tahun 2019 ikut serta menangani proses persalinan salah satu warga binaan.

Karakteristik Lembaga, Rezim Yang Sedang Berkuasa Di Lingkungan Dimana Implementasi Kebijakan Dilaksanakan

Pertama implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok tertentu, penyelesaian konflik akan menentukan siapa dan mendapatkan apa. Ini dapat menjadi gambaran karakteristik lembaga atau aktor yang menjadi implementor kebijakan. Jika dilihat dari tindakan Pemerintah Daerah kota Sukabumi, hal ini menandakan bahwa Pemerintah mempunyai keseriusan dan ketegasan terhadap pemecahan masalah rakyat. Keseriusan dan ketegasan ini kemudian diikuti para pelaksana di lapangan yang menjadi corak kepemimpinan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi saat ini.

Kedua tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi kebijakan program inovasi Lasegar merupakan hasil dari perhitungan kepentingan politik, yang di dalamnya terdapat persaingan dan kepentingan kelompok untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas semuanya berinteraksi dalam konteks kebijakan. Pada pelaksanaan program inovasi Lasegar semua pihak yang terlibat mempunyai pengaruh untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Ketiga target pencapaian kebijakan program inovasi Lasegar sudah sesuai dengan yang diinginkan pemerintah dapat dilihat dari diagram berikut.



Diagram 1. Data warga binaan yang terkena penyakit setelah diimplementasikannya program lasegar

Dari tahun 2020 sampai 2022 implementasi program inovasi lasegar berjalan dengan baik, meskipun berdasarkan data terbaru terlihat ada tren kenaikan. Contoh kasus tuberkulosis, Hipertensi, Scabies, dan DM. Kasus tersebut bukan karena Program Lasegar tidak berjalan efektif, akan tetapi dari terus bertambah nya warga binaan baru yang sudah terpapar sebelum masuk ke Lapas.

Oleh karena itu, Pemerintah dan para pelaksana lainnya sepakat bahwa, kebijakan program inovasi lasegar ini tidak hanya untuk diimplementasikan pada tahun 2022-2023 saja, sebagai jawaban dari problem yang terjadi di lapas terkait belum maksimalnya akses layanan kesehatan namun dalam program ini akan ada inovasi lain yang sifatnya berkelanjutan sehingga yang masih menjadi kekurangan-kekurangan dapat diatasi melalui inovasi tambahan.

Keempat implementasi program inovasi lasegar sudah sangat didukung oleh sumber daya yang cukup memadai, dapat terlihat dari kontribusi kinerja berbagai pihak dari tahun 2019-2022 yang terus mengalami peningkatan. Namun masih terdapat kekurangan seperti dari jumlah tenaga medis yang belum maksimal sehingga mereka mengalami keterlambatan dalam pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana lapas yang masih memerlukan tambahan.

Mengukur Tingkat Kepatuhan Serta Respon Dari Para Aktor Atau Pelaksana Dalam Menyikapi Implementasi Kebijakan

Untuk memastikan apa yang menjadi tujuan dari program dapat tercapai maka para pelaksana diantaranya harus mempertimbangkan dua hal yaitu: (1) Harus memastikan terjaganya ketaatan para pelaksana agar hasil akhir dari kebijakan program inovasi Lasegar dapat tercapai walaupun harus menangani berbagai interaksi antara aktor yang mempunyai kepentingan dalam kebijakan. (2) Harus memasukan responsivitas dari para pelaksana terhadap keinginan-keinginan dari penerima manfaat program inovasi Lasegar

Pertama berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak sebagai pelaksana, warga binaan cukup puas dengan kebijakan program inovasi Lasegar sejauh ini, selain itu mereka menyambut baik terhadap langkah yang diambil pemerintah dalam aspek pelayanan kesehatan.

Kedua dampak implementasi program inovasi lasegar (1) Penyakit dapat terdeteksi lebih awal (2) Penanganan dilakukan secara represif dan preventif (3) Adanya pembinaan terhadap warga binaan yang seakan-akan menjadi kader tenaga kesehatan (4) Tidak adanya diskriminasi serta memperluas akses pelayanan kesehatan (5) Menurunnya jumlah wbp yang dirujuk ke rumah sakit.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan program Lasegar di Lapas Kelas IIB kota Sukabumi pada umumnya sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari 3 kriteria konteks kebijakan implementasi sebagaimana yang dikemukakan oleh M.S. Grindel (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. (2) Karakteristik lembaga, rezim yang sedang berkuasa. (3) Tingkat kepatuhan serta respon dari para aktor dan pelaksana

Inovasi lasegar berdampak baik terhadap masalah yang dihadapi warga binaan untuk menghapus sistem diskriminasi dan memudahkan akses pelayanan kesehatan karena penyebaran penyakit terdeteksi lebih dini serta menurunnya jumlah warga binaan yang dirujuk ke rumah sakit. Selain itu program inovasi Lasegar berkembang menjadi 22 pelayanan kesehatan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi warga binaan.

SARAN

1. Diharapkan Pemda Kota Sukabumi dan Bappeda Kota Sukabumi lebih intens dalam peningkatan inovasi-inovasi untuk perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Sukabumi
2. Diharapkan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Puskesmas Pabuaran, Klinik Lapas Kota Sukabumi selain memberikan pelayanan kesehatan fisik, tetapi harus memberi pelayanan non fisik seperti dalam Psikolog atau kejiwaan.
3. Diharapkan adanya penambahan tenaga kesehatan karena jumlah warga binaan dari tahun 2020-2022 terus bertambah. Serta penambahan sarana lapas agar tidak terjadinya over kapasitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Madani, M., & Rusdi, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta Graha Ilmu.
- Moleong (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Edisi Revisi ; Cetakan Ketiga Puluh Delapan*. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Pelayanan Publik*. AlphaBeta Cv.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah No No. 3 Tahun 2021
- Pramono, J. (2022). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Sa'ud, U. S., & Riduwan. (2018). *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Walikota Sukabumi No. 188.45/190-Bappeda/2022
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Sari, M.P., & Pratiwi, D.A (2021). *Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Batam*. *Jurnal Trias Politika*.
- Sari, Y. R. (2019). *Inovasi pelayanan Publik Melalui Solo Destination di Kota Surakarta, Jawa Tengah*. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi Bandung.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995
- Undang- Undang No. 23 Tahun 2014
- Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- https://Pelitasukabumi.Com/2022/12/06/24403/Kota-Sukabumi/Inovasi-Lasegar_Masuk-Top-21-Kijb-Dan-Inovasi-Unggulan-Iga-2022/
- <https://Radarsukabumi.Com/Kota-Sukabumi/Gandeng-Lapas-Sukabumi-Inovasi\ Lasegar-Masuk-10-Nominator-Penghargaan-Iga/>